



Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara di Tinjauan Dari Undang – Undang

M. Rivatul Ulum¹, Cicilia Maret Tan², Rayi Kharisma Rajib³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

Keputusan telah diambil untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara. Alasan di balik langkah ini adalah untuk memitigasi risiko bencana dan mengurangi kepadatan penduduk di wilayah DKI Jakarta. Relokasi tersebut dilakukan dalam rangka berpindah ke wilayah tengah Indonesia yang masih memiliki lahan luas yang belum dikembangkan. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh risiko bencana dan kelebihan penduduk di wilayah DKI Jakarta. Meski demikian, kebijakan penulanan IKN mendapat dukungan dan kritik dari berbagai sektor. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji dampak penulanan IKN dan mengevaluasi peran pemerintah dalam memitigasi kerusakan yang diakibatkannya. Pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, meliputi tinjauan literatur observasional yang mengkaji peran pemerintah melalui perspektif Keynesian. Selain itu, penelitian ini menggabungkan analisis media berita. Pengalihan IKN mempunyai dampak yang beragam, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik, namun juga berdampak signifikan terhadap lingkungan. Dampak buruk Degradasi lingkungan yang dialami di Kalimantan Timur diakibatkan oleh pembukaan lahan secara besar-besaran untuk pembangunan IKN, yang melibatkan aktivitas seperti penggundulan hutan. Menganalisis situasi ini dalam perspektif Keynesian, peran pemerintah atau kehadiran negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi risiko yang terkait dengan transportasi IKN, pemerintah secara bersamaan memanfaatkan sumber daya dan melaksanakan inisiatif untuk pemerataan pembangunan. Wujud dari pendekatan ini adalah penerapan konsep Hutan Kota dalam proyek konstruksi.

Keywords: Ibu Kota Indonesia; Peran Pemerintah; Dampak Pembangunan; Kerusakan Lingkungan
Ibu Kota Indonesia; Peran Pemerintah; Dampak Pembangunan; Kerusakan Lingkungan

(*) Corresponding Author:

ulumrivatul@students.unnes.ac.id¹,

ciciliamaretan@students.unnes.ac.id², rayirajib@mail.unnes.ac.id³

How to Cite:

PENDAHULUAN

Saat ini pelaksanaan pemindahan ibu kota negara yang disingkat IKN sedang berlangsung. Presiden Joko Widodo menjelaskan persiapan langkah tersebut, seraya menegaskan pemindahan tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko bencana di ibu kota. Lokasi yang dipilih berada pada posisi strategis di tengah dan kondusif bagi pertumbuhan kawasan, menawarkan ketersediaan lahan yang melimpah (Budiman, 2022). Namun, jelas bahwa kebijakan ini menimbulkan reaksi

positif dan negatif. Sisi positifnya, relokasi ini diharapkan dapat mengefisienkan pemanfaatan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan di Kalimantan Timur sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional. Meski demikian, ada juga dampak negatif yang mungkin timbul akibat pemindahan ibu kota. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran, khususnya di hutan dan lahan gambut, merupakan praktik destruktif yang memiliki dampak luas. Proses ini menimbulkan ancaman signifikan terhadap lingkungan alam dan masyarakat secara keseluruhan. Tindakan pembakaran dapat mengakibatkan konsekuensi yang parah dan merusak bagi ekosistem hutan, mengganggu keseimbangan flora dan fauna di dalamnya. Selain itu, dampaknya juga meluas ke aspek kemasyarakatan, mempengaruhi komunitas yang bergantung pada ekosistem ini untuk penghidupan dan kesejahteraannya.

Persoalan pemindahan ibu kota Indonesia bukanlah sebuah perkembangan terkini; Melainkan sudah menjadi agenda sejak zaman Hindia Belanda. Isu ini mula-mula mengemuka pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Hal ini kemudian muncul kembali ketika Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan mengambil langkah proaktif dalam mengatasi masalah tersebut. Lokasi yang dipilih untuk ibu kota baru, Kalimantan, memiliki lahan yang luas, yang saat ini ditandai dengan perluasan hutan lindung, termasuk lahan gambut. Lahan gambut luas yang menutupi Kalimantan merupakan ekosistem penting yang memerlukan pertimbangan cermat oleh pemerintah. Usulan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan, ditambah dengan pengembangan lahan skala besar melalui deforestasi, menimbulkan ancaman besar terhadap lahan gambut. Situasi ini tidak hanya membahayakan keberadaan lahan gambut, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat lokal di Kalimantan.¹

Penajam Paser dan Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi peruntukan ibu kota baru Indonesia. Kawasan ini dikenal dengan tipe hutannya yang beragam, meliputi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Kekhawatiran muncul mengenai potensi konsekuensi dari pembukaan lahan untuk pembangunan ibu kota baru. Dampak tersebut antara lain terganggunya ekosistem hutan dan potensi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, seperti yang ditunjukkan oleh temuan Greenpeace pada tahun 2015 hingga 2019. Pada periode tersebut, Kalimantan Timur banyak mengalami titik api kebakaran lahan dan perusakan hutan. Tren yang mengkhawatirkan ini menggarisbawahi perlunya upaya bersama untuk mengatasi dan memitigasi beban lingkungan yang dibebankan pada wilayah ini. Praktik berkelanjutan dan kebijakan yang efektif sangat penting untuk mengekang kerusakan lebih lanjut dan mendorong keseimbangan ekologi yang lebih sehat. Pemindahan ibu kota baru ke wilayah yang telah ditentukan menimbulkan berbagai risiko yang dapat diantisipasi dan menjadi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Konsekuensi potensialnya mencakup berkurangnya lahan gambut dan lahan hijau, yang menyebabkan kelangkaan elemen-elemen penting ini dan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang rentan. Tujuan utama artikel ini adalah untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai

¹ AMILA, Siti, et al. Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2023, 10-18.

aspek utama yang mungkin terkena dampak kebijakan ini, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Lebih jauh lagi, laporan ini akan menyelidiki konteks saat ini, dengan menekankan peran pemerintah dalam mengatasi dan memitigasi dampak buruk yang timbul dari keputusan penting untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mencakup inisiatif ambisius untuk merelokasi ibu kota Indonesia. Keputusan penting ini menetapkan dua kabupaten tertentu di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sebagai lokasi ibu kota baru. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun rencana untuk memindahkan pegawai negeri sipil ke pusat administrasi baru di Kalimantan Timur, dan proses relokasi dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2024. Langkah penting ini diperkirakan akan mempunyai konsekuensi yang luas, terutama berdampak pada pegawai negeri sipil yang saat ini masih berada di negara tersebut. DKI Jakarta. Keputusan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa bertujuan untuk mendorong pemerataan perekonomian di Indonesia. Langkah strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan bagi wilayah sekitarnya, karena pemilihan lokasi tersebut diharapkan dapat mempengaruhi arus perdagangan ke luar Pulau Jawa. Hasil yang diharapkan adalah distribusi peluang ekonomi yang lebih seimbang, dan dampak dari relokasi ini akan meluas hingga melampaui batas pulau Jawa. Lebih lanjut, perluasan investasi diharapkan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan di berbagai sektor. Namun, penting untuk mempertimbangkan aspek lain, khususnya dalam proses pembangunan proyek ibu kota baru Indonesia (IKN). Menurut Ria dkk. (2020), sebanyak 56% tenaga kerja yang terlibat dalam proyek ini berasal dari Pulau Jawa, sementara hanya 8% yang mewakili penduduk Pulau Kalimantan. Patut dicatat, proyek IKN yang mengatasnamakan kepentingan umum dan terwujudnya pemerataan kesejahteraan sosial merupakan proyek negara yang berjangka panjang. Terlepas dari keuntungan ekonominya, komposisi demografi angkatan kerja yang terlibat memerlukan perhatian dan penilaian untuk memastikan proses pembangunan yang lebih seimbang dan inklusif. Sejalan dengan perspektif ekonomi Keynesian, asal usul konsep makroekonomi ini dapat ditelusuri kembali ke ekonom Inggris John Maynard Keynes pada tahun 1930-an, sebagai respons terhadap pemahaman seluk-beluk Depresi Besar. Prinsip dasar ekonomi Keynesian berkisar pada keyakinan bahwa intervensi pemerintah sangat penting untuk menstabilkan perekonomian. Keynes berpendapat bahwa intervensi pemerintah atau negara diperlukan karena tanpa adanya regulasi, dimana investor diperbolehkan beroperasi secara bebas, mengikuti konsep “tangan tak kasat mata” yang dikemukakan Adam Smith, pemanfaatan sumber daya secara optimal tidak mungkin tercapai. Dalam skenario khusus ini, Keynes berpendapat bahwa intervensi pemerintah sangatlah penting untuk mengatasi ketidakstabilan yang melekat pada perekonomian kapitalis. Perspektif Keynes menjadi argumen tandingan terhadap gagasan Adam Smith tentang "tangan tak terlihat". Keynes menepis anggapan bahwa perekonomian secara alami cenderung kembali ke keadaan ekuilibrium setelah mengalami penurunan. Sebaliknya, ia percaya bahwa selama krisis ekonomi, apa pun penyebabnya, ketakutan dan pesimisme yang ada di kalangan dunia usaha dan

investor akan mengarah pada siklus yang terus berlanjut, sehingga mengakibatkan depresi ekonomi dan kemiskinan yang berkepanjangan.²

Menanggapi hal ini, Keynes menganjurkan kebijakan fiskal countercyclical. Menurut pendekatan ini, selama periode krisis ekonomi, pemerintah harus melakukan belanja defisit untuk mengkompensasi penurunan investasi swasta dan merangsang peningkatan belanja konsumen. Tujuannya adalah untuk menstabilkan permintaan agregat. Sementara ilmu ekonomi Keynesian mendapat kritik dari beberapa ekonom, yang berpendapat bahwa respons bisnis terhadap insentif ekonomi secara alami akan memulihkan keseimbangan ekonomi kecuali pemerintah mengganggu proses ini melalui intervensi terhadap harga dan upah, sehingga pasar tampak seolah-olah dapat mengatur dirinya sendiri.

Pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan membawa dampak yang luas pada berbagai aspek, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan kebijakan yang signifikan ini menyiratkan adanya penyesuaian yang substansial, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Kalimantan, yang siap mengalami transformasi substansial. Dampak dari keputusan ini mencakup dimensi ekonomi, politik, dan lingkungan hidup, dengan banyak aspek yang diperkirakan akan terpengaruh. Oleh karena itu, tujuan utama artikel ini adalah untuk menyelidiki inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan memitigasi risiko dan kerusakan yang diakibatkan oleh pemindahan ibu kota negara.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif disertai tinjauan literatur untuk mengkaji peran pemerintah dalam perspektif Keynesian, dengan menggunakan informasi dari sumber media. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ilmu sosial, seperti yang ditunjukkan oleh Bogdan & Biklen (1992), melibatkan prosedur penelitian yang hasil akhirnya terdiri dari data yang diperoleh secara deskriptif dari perilaku, tulisan, dan ucapan yang diamati. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang pokok bahasan, menyoroti aspek-aspek berbeda dari fenomena yang diselidiki (Bogdan & Biklen, 1992).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan dari dampak pemindahan ibu kota?
2. Bagaimanakah Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan dampak dari pemindahan ibu kota?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Pemindahan Ibu Kota Indonesia

² AMILA, Siti, et al. Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2023, 10-18.

³ AMILA, Siti, et al. Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2023, 10-18.

Luas kawasan hutan produksi yang berada di sekitar ibu kota baru mencapai 63.434 hektar, sedangkan rencana pembangunan ibu kota sendiri seluas 256.654 hektar. Di wilayah ini, terdapat dua konsesi yang menonjol, yaitu PT. ITCI Hutani Manunggal seluas 37.314 hektare dan PT Inhutani I Batu Ampar seluas 16.058 hektare. Selain cakupan lahannya yang luas, kawasan ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, meliputi 527 spesies tumbuhan, 100 spesies mamalia, 180 spesies burung, dan lain-lain, beberapa di antaranya dilindungi dan endemik di wilayah tersebut. Keanekaragaman spesies ini tersebar di tiga tipe hutan, yaitu Lutung Merah, Macan Dahan, Beruang Madu, Orangutan, Kucing Hutan, dan berbagai jenis lainnya. Dari sudut pandang ekonomi, sebagaimana disoroti oleh Hartley (1995) dan dikutip dalam Saputra dkk. (2021), penentuan ibu kota melibatkan pertimbangan yang berlandaskan keekonomian pertanahan. Perspektif ilmiah ini menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, alokasi sumber daya, dan stabilisasi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Jakarta saat ini berfungsi sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, sehingga keputusan jangka panjang untuk memindahkan ibu kota melalui kebijakan IKN merupakan langkah strategis yang tepat untuk meringankan beban ibu kota yang ada. Selain itu, peralihan ini diharapkan dapat merangsang investasi yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDB nasional, mengingat ibu kota berfungsi sebagai titik fokus kegiatan pemerintahan dan pusat perkantoran. Meskipun ada harapan optimis bahwa relokasi IKN akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan yang adil, penting untuk menyadari bahwa pemindahan ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Oleh karena itu, hasil positif dalam waktu dekat tidak dapat diantisipasi. Proses relokasi yang rumit tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah kondisi awal lahan di Kalimantan Timur yang cenderung gembur, berbeda dengan kondisi tanah di Jakarta atau Bandung yang lebih padat. Oleh karena itu, upaya tambahan, seperti perlunya menancapkan paku tanah dua kali untuk mencapai lapisan keras, mungkin diperlukan, yang berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran dan waktu dalam proses pembangunan.⁴

Berdasarkan kajian Bappenas, pengalihan IKN diperkirakan akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional dengan perkiraan peningkatan sebesar 0,1%. Pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh efisiensi pemanfaatan sumber daya, termasuk pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Bappenas menilai lebih lanjut upah angkatan kerja berpotensi meningkat sebesar 1,37%, dan kemungkinan terjadi inflasi moderat sekitar 0,2% selama pembangunan IKN. Inflasi ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan biaya material. Selain itu, arus perdagangan diperkirakan akan meningkat hingga 50%, terutama disebabkan oleh munculnya kawasan industri di wilayah IKN dan integrasinya dengan wilayah lain di seluruh Indonesia. Dimensi politik dalam proses perpindahan IKN diwarnai dengan kontroversi dan rentan terhadap berbagai tantangan. Proses pengambilan

⁴ Ramadhani, R., & Djuyandi, Y. (2022). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 144-152.

keputusan, di tengah pandemi COVID-19 yang meluas, telah memicu banyak polemik dan para kritikus berpendapat bahwa proses tersebut mengabaikan aspirasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan Ujang (Wardhani, 2022), beberapa kelompok masyarakat menentang keras kebijakan tersebut dengan alasan kebijakan tersebut kurang memberikan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat mengenai rencana pemindahan IKN. Perumusan undang-undang terkait relokasi IKN dikritik karena kurang aspiratif karena tidak dipertimbangkan dan didiskusikan secara menyeluruh dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga banyak penolakan dan petisi yang menentangnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mendesak untuk memastikan bahwa pemerintah, Sekretariat Negara (KSP), dan Keraton dengan penuh perhatian memperhatikan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan yang benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, dan tidak mengabaikan sentimen masyarakat dan berpihak pada kepentingan rakyat. kepentingan kelompok tertentu. Dari segi lingkungan hidup,⁵ pemindahan ibu kota ke pulau lain menimbulkan beberapa kekhawatiran. Aspek ini mempunyai banyak kelemahan, khususnya kekhawatiran akan dampak buruk terhadap hutan yang melimpah di Kalimantan Timur. Penggunaan lahan secara luas untuk tujuan pembangunan meningkatkan kewaspadaan akan potensi ancaman terhadap fauna lokal yang berada di hutan-hutan tersebut. Selain itu, Kalimantan Timur, yang terkenal sebagai “paru-paru dunia”, menghadapi degradasi hutan akibat deforestasi, yang menyebabkan peningkatan risiko banjir dan peningkatan emisi karbon (Saputra dkk., 2021). Tantangan lingkungan serupa juga terjadi di beberapa daerah, seperti Jakarta dan Tangerang, dimana pembangunan telah berkontribusi terhadap meluasnya banjir, sehingga perlunya pertimbangan hati-hati dan langkah-langkah mitigasi dalam proses pemindahan ibu kota. Isu deforestasi telah menarik perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan selama empat dekade terakhir, dan muncul sebagai permasalahan lingkungan yang kompleks dengan konsekuensi yang luas. Sifat rumit dari kekhawatiran ini menunjukkan relevansinya dan kemungkinan akan terus berlanjut di masa depan. Deforestasi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor biofisik, diakui sebagai kontributor signifikan terhadap meningkatnya krisis pemanasan global, yang merupakan pendorong utama perubahan iklim. Dampak pemanasan global sangat besar, menimbulkan berbagai ancaman terhadap kehidupan di bumi, termasuk peningkatan emisi gas rumah kaca, badai tropis, kekeringan, kepunahan spesies, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang berpuncak pada degradasi lahan. Mengingat konsekuensi yang mengerikan ini, terdapat kebutuhan mendesak akan upaya global yang terpadu untuk mengatasi pemanasan global yang disebabkan oleh deforestasi. Upaya ini memerlukan keterlibatan aktif semua negara, apapun tingkat pembangunannya, untuk bekerja sama menghentikan degradasi hutan dan memitigasi dampak buruk terhadap lingkungan.⁶

⁵ AMILA, Siti, et al. Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2023, 10-18.

⁶ Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13-29.

Di berbagai wilayah di Indonesia, deforestasi merupakan masalah yang berulang, terutama didorong oleh program pembangunan. Program-program ini sering kali menargetkan lahan untuk pembangunan perumahan dan infrastruktur, yang didukung oleh kepentingan pemerintah dan ekonomi. Selain itu, kawasan hutan sering kali dialihkan untuk kegiatan ekstraktif seperti pertambangan dan industri, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat, pengusaha, dan LSM lingkungan hidup. Degradasi hutan di Indonesia juga disebabkan oleh praktik pengelolaan hutan yang buruk, termasuk pemanenan yang berlebihan dan upaya regenerasi yang tidak memadai. Bank Dunia melaporkan adanya degradasi tahunan sekitar 1 juta hektar hutan tropis di Indonesia, yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Deforestasi ini terkait dengan emisi empat gas rumah kaca utama: karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan klorofluorokarbon, yang selanjutnya berfokus pada dampak lingkungan dari praktik deforestasi di Indonesia. Perubahan iklim akibat pemanasan global memberikan ancaman yang dapat menimbulkan bencana besar. Dampaknya meluas pada perubahan pola pertanian, baik di Indonesia maupun dalam skala global. Mencairnya es di Arktik dan Antartika, ditambah dengan kenaikan suhu air laut dan naiknya permukaan air laut, akan mengubah iklim dunia dan berpotensi membahayakan seluruh planet. Isu perubahan iklim telah mendapat perhatian internasional sejak penandatanganan perjanjian iklim di Rio De Janeiro pada tahun 1992. Kekhawatiran ini telah berkembang dari permasalahan ilmiah menjadi permasalahan politik internasional yang kompleks. Berbagai sejarawan dan organisasi non-pemerintah (LSM) telah memainkan peran penting dalam mendorong isu ini ke kancah global. Pada pertengahan tahun 1980-an, momentum kebijakan iklim memperoleh daya tarik ketika penelitian para ilmuwan mengenai pemanasan global dimasukkan ke dalam diskusi kebijakan. Pembangunan besar-besaran yang direncanakan di wilayah Kalimantan Timur, meliputi gedung pemerintahan, hotel, bandara internasional, rumah sakit, supermarket, mal, apartemen, tempat ibadah, dan masih banyak lagi, diperkirakan akan menimbulkan beban lingkungan yang signifikan. Pembangunan ini tidak hanya akan mengubah lanskap fisik Kalimantan Timur tetapi juga memperburuk kerusakan lingkungan, terutama seiring dengan perubahan arah perkotaan. Alokasi lahan yang besar untuk peningkatan pembangunan juga akan menyebabkan pergeseran fungsi kawasan. Transformasi tersebut, khususnya perubahan kawasan hijau di Kalimantan Timur, dapat mengakibatkan berkurangnya peran ruang-ruang tersebut sebagai komponen vital seperti paru-paru dunia dan pendukung penting kualitas udara. Pada akhirnya, penurunan fungsi kawasan ini akan berdampak buruk pada kualitas lingkungan secara keseluruhan, termasuk penurunan kualitas udara, tanah, dan air, yang semuanya penting bagi kebutuhan manusia sehari-hari. Pembukaan lahan secara besar-besaran, terutama melalui penggundulan hutan dalam skala besar di berbagai kawasan hijau, selanjutnya dapat berkontribusi terhadap terjadinya bencana seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor, yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Tidak hanya dirasakan oleh manusia, penggundulan hutan dilakukan atas nama juga kepentingan kesejahteraan masyarakat dampaknya terhadap flora dan fauna. Sejauh ini, Kalimantan Timur adalah wilayah yang penuh dengan hal tersebut dengan keanekaragaman hayati. Karena itu, Pembukaan lahan tentu saja akan terjadi menghancurkan habitat berbagai flora dan fauna. Meski konservasi flora dan fauna

tetap dilakukan fauna terancam, tapi semuanya sudah dilakukan karena ekosistem dan habitatnya Terancam kepentingan pembangunan. Sementara Namun flora, fauna dan organismenya masih banyak masih belum ditemukan oleh para peneliti. Itu juga akan menyebabkan punahnya flora dan fauna belum diketahui. Kepunahan yang akan terjadi menyebabkan terganggunya rantai makanan, ekosistem, sehingga pada akhirnya pembangunan apa yang terjadi akan mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam diskusi dengan pengembang dan Anggota DPD RI H.TB. M. Ali Ridho Azhari, S.H, M.I.Kom, disebutkan bahwa tanah di wilayah Kalimantan Timur memiliki ciri komposisi yang gembur, berbeda dengan wilayah seperti Jakarta atau Bandung. Oleh karena itu, upaya tambahan seperti menancapkan paku tanah sebanyak dua kali hingga mencapai lapisan keras dianggap perlu (Polsight, 2022). Mengingat karakteristik geologi tersebut, pemerintah harus terlibat dalam perencanaan pembangunan yang matang dengan mengadopsi konsep Kota Hutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pembangunan dengan perlindungan kawasan hutan, keanekaragaman hayati, dan pelestarian hutan sebagai zona penyerapan karbon yang penting. Integrasi pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi penting untuk menjamin pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.⁷

Ekstraksi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia yang kaya akan kekayaan alam yang melimpah. Faktor-faktor seperti pembangunan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan urbanisasi terus meningkatkan permintaan akan sumber daya, yang mengarah pada pengelolaan intensif atas kekayaan alam. Deforestasi, sering kali dibenarkan atas nama kemajuan ekonomi dan sebagai sumber energi domestik, mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mengakibatkan erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, penggurunan, kekeringan, banjir, dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Deforestasi di rawa gambut tropis sekunder mempunyai dampak yang sangat signifikan, yaitu menurunkan pH air tanah secara signifikan dan menghabiskan nutrisi makro penting di lahan komunal. Akibat-akibat yang merugikan ini secara kolektif mempunyai dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan dan berbagai kehidupan. Selain dampak yang disebutkan di atas, deforestasi juga mempunyai dampak besar terhadap perubahan iklim. Rencana pengalihan IKN diperkirakan akan memperbesar kejadian penebangan dan penggundulan hutan dalam skala global, sehingga memberikan dampak global, terutama terhadap perubahan iklim. Dampaknya tidak hanya terbatas pada pengamatan baru-baru ini mengenai pencairan es di kawasan kutub, namun diperkirakan akan semakin parah di masa depan, sehingga menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi umat manusia. Dampak buruk penggundulan hutan tidak hanya terbatas pada saat ini saja; hal ini diperkirakan akan meningkat dan memburuk di masa depan, sehingga menggarisbawahi pentingnya strategi mitigasi yang komprehensif.⁸

⁷ Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. Bappenas Working Papers, 4(1), 13-29.

⁸ Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. Bappenas Working Papers, 4(1), 13-29.

2.Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kerusakan Akibat Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Kerusakan di Indonesia akibat deforestasi telah menjadi permasalahan yang sudah berlangsung lama, tidak hanya sebatas pembangunan atau relokasi ibu kota Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, sektor kehutanan relatif belum tersentuh dan hutan belum banyak dieksploitasi. Namun seiring berjalannya waktu, skenario ini berubah secara signifikan. Pasca runtuhnya Orde Lama, rezim Orde Baru selanjutnya secara aktif mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk hutan. Pendekatan ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang timbul dari berbagai faktor. Pemberlakuan undang-undang penanaman modal semakin mempercepat pemanfaatan sumber daya hutan secara luas. Eksploitasi hutan, yang dahulu merupakan upaya sederhana, kini meluas secara dramatis di bawah rezim Orde Baru. Pemerintah secara aktif mempromosikan dan mendukung usaha bisnis di berbagai sektor, termasuk kehutanan, yang berkontribusi terhadap peningkatan deforestasi secara signifikan. Periode ini menyaksikan aktivitas deforestasi skala besar yang didorong oleh pertimbangan ekonomi dan kebijakan pemerintah.⁹

Konsekuensi dari deforestasi besar-besaran ini mempunyai banyak aspek dan mencakup degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan dampak buruk terhadap masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong praktik kehutanan berkelanjutan menjadi semakin penting akhir-akhir ini. Ketika Indonesia menghadapi tantangan akibat deforestasi, semakin banyak kesadaran akan perlunya strategi komprehensif untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pasca penerapan peraturan tersebut, sektor kehutanan mengalami pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Lonjakan keuntungan ini memainkan peran penting dalam mendukung inisiatif pembangunan dan mengatasi utang luar negeri. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah dominasi Indonesia di pasar produk kayu pada awal tahun 1990an, dimana negara ini memegang posisi penting dalam produksi kayu mentah dan kayu olahan dari hutan tropis, melebihi negara-negara berkembang lainnya. Walaupun keberhasilan ekonomi ini tampak menjanjikan, namun hal ini juga menimbulkan beban lingkungan yang besar. Sayangnya, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ini sering kali kurang memiliki komitmen untuk memulihkan sumber daya alam terbarukan dengan kecepatan yang berkelanjutan. Fokus utama program ini adalah pada upaya ekonomi, namun perhatian terhadap kerusakan lingkungan dan dampak-dampak terkait masih kurang. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang ada perlu dievaluasi kembali untuk memastikan pendekatan yang seimbang yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi namun juga pelestarian dan regenerasi sumber daya alam yang penting. Pada tahun 2003, Departemen Kehutanan melaporkan adanya degradasi hutan yang signifikan di Indonesia, yaitu sebesar 43 juta hektar dari total luas 120,35 hektar, dan tren ini terus berlanjut.

⁹ Ramadhani, R., & Djuyandi, Y. (2022). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 144-152.

Tahun berikutnya, pada tahun 2004, Indonesia mengalami kerugian finansial yang cukup besar akibat maraknya pembalakan liar. Melihat kenyataan ini, menjadi jelas bahwa bahkan ketika negara-negara maju menjalani industrialisasi, hutan mereka sering kali menjadi korban eksploitasi. Meskipun negara-negara tersebut berkontribusi besar terhadap pemanasan global dan kerusakan lingkungan lainnya, negara-negara berkembang ini justru menyalahkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun negara-negara berkembang menolak tuduhan tersebut, konflik kepentingan cenderung berpihak pada negara-negara berkembang. Berbagai cara dilakukan untuk memajukan kepentingan tersebut, seperti mewajibkan negara berkembang seperti Indonesia untuk menandatangani perjanjian dengan lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Perjanjian-perjanjian ini, seperti Letter of Intent, sering kali berfungsi sebagai alat kontrol oleh negara-negara maju, yang konon bertujuan untuk mencegah praktik monopoli. Akibatnya, dinamika kompleks seputar perjanjian internasional menggarisbawahi tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam melestarikan sumber daya alam mereka dan menavigasi jaringan kebijakan lingkungan dan ekonomi global yang rumit. Walaupun tujuan umum kebijakan pemerintah seringkali positif, namun masih terdapat kekurangan yang nyata. Paradoksnya, pemerintah Indonesia, meskipun memiliki tujuan yang baik, sering kali merumuskan kebijakan yang, pada praktiknya, memberikan dampak dan konsekuensi yang diketahui. Meskipun sudah diatur secara hukum, upaya restorasi dan perlindungan lahan gambut di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin konservasi lahan, belum sepenuhnya efektif dalam memitigasi dampak negatif yang diperkirakan terjadi. Kerangka hukum yang ada menguraikan pentingnya menjaga lahan gambut, namun implementasi praktis dari peraturan ini mengungkapkan kesenjangan dan tantangan dalam mencapai tujuan konservasi lahan yang komprehensif.¹⁰

Meski demikian, pemerintahlah yang memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke kota baru bernama IKN yang terletak di Kabupaten Penajam, Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah yang dipilih ini mencakup lahan gambut yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kelestarian ekosistem akibat kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendirian ibu kota baru. Perlindungan lahan gambut di Indonesia berada di bawah kajian peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah 71/2014, yang menguraikan langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Peraturan ini semakin didukung oleh Undang-Undang 32 Tahun 2000 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UUD 1945.¹¹

Bertentangan dengan peraturan tersebut, keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota menimbulkan kekhawatiran karena lokasi yang dipilih melibatkan pembukaan lahan di kawasan gambut. Kesenjangan ini patut

¹⁰ SAPUTRA, Surya Dwi, et al. Analisis strategi pemindahan ibu kota negara Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi pertahanan (studi kasus upaya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Ekonomi Pertahanan*, 2021, 7.2: 192-220.

¹¹ Pembangunan IKN Nusantara hingga Munculnya Petisi - *Tribunnews.com*.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/pengamat-ungkap-alasan-terjadinyapolemik-pembangunan-ikn-nusantara-hinggamunculnya-petisi>

diperhatikan, mengingat adanya kontradiksi dengan peraturan yang bertujuan melindungi lahan gambut (Theresia dkk., 2020a). Wilayah di Kalimantan Timur, tempat ibu kota baru didirikan, mencakup banyak zona hijau, termasuk lahan gambut. Pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam proses pendirian ibu kota baru dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan jika tidak dikendalikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan lingkungan yang ada dan potensi dampaknya terhadap ekosistem di Kalimantan Timur.¹²

Sejalan dengan perspektif Keynesian, peran pemerintah atau negara dipandang penting dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya untuk optimalisasi perekonomian. Namun perkembangan terkini di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran mengenai penentuan prioritas perspektif ini, khususnya dalam bidang konservasi sumber daya alam. Meskipun keputusan untuk merelokasi ibu kota dipicu oleh kemacetan yang berlebihan dan kerentanan terhadap bencana di Jakarta, termasuk banjir, pendekatan yang dilakukan saat ini tampaknya mengesampingkan aspek penting dari konservasi sumber daya alam. Pembukaan lahan di kawasan lahan gambut, meskipun bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah mendesak, berpotensi mengulangi tantangan serupa dalam jangka panjang. Meskipun relokasi dianggap perlu karena permasalahan yang ada di Jakarta, pemerintah perlu mengambil strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa permasalahan yang dihadapi ibu kota asal tidak terulang kembali di lokasi baru. Potensi dampak lingkungan dari pembukaan lahan di lahan gambut memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan. Pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan menerapkan langkah-langkah yang mencegah ibu kota baru menghadapi tantangan yang tidak dapat diperbaiki dalam perencanaan kotanya, menghindari skenario dimana pembangunan perkotaan menjadi tidak berkelanjutan dan mengharuskan memulai kembali proses perencanaan dari awal. Pemerintah harus menunjukkan kapasitas yang kuat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasan selanjutnya.¹³

Pemindahan ibu kota baru harus didekati dengan kesadaran yang tinggi akan potensi dampaknya terhadap keberlanjutan lahan gambut, sehingga memerlukan keselarasan dengan tujuan dasar pemberian otonomi kepada daerah terkait. Meskipun terdapat hubungan yang tidak dapat disangkal antara peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemanfaatan sumber daya, penting untuk mengakui peran integral dari lingkungan. Pengakuan ini menjadi sangat penting mengingat dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek, termasuk dimensi sosial dan ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan ini menggarisbawahi motivasi utama untuk mengadopsi perencanaan dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Peran penting pemerintah daerah semakin dikedepankan, hal ini menunjukkan pentingnya pemerintahan daerah yang efektif dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup

¹² Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13-29.

¹³ SIHOMBING, Ricky Martin, et al. The impact of Indonesia capital relocation to Kalimantan peatland restoration. *Sociae Polites*, 2020, 21.2: 234-244.

yang efektif. Kemampuan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan proyek ibu kota baru memerlukan pemahaman komprehensif dan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam praktik tata kelola baik di tingkat regional maupun nasional.¹⁴

Namun dampak terhadap kualitas hidup manusia tidak dapat dihindari jika beban lingkungan akibat kerusakan dan pencemaran tidak terkendali. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, karena menjaga lingkungan yang terorganisir dengan baik dan bersih sangatlah penting. Keterlibatan pemerintah daerah, khususnya di daerah yang mempunyai otonomi, menjadi penting dalam mengembangkan strategi pengelolaan lingkungan dan inisiatif konservasi sumber daya alam yang efektif. Desentralisasi telah memberikan peran penting kepada pemerintah daerah dalam menjaga dan mengawasi aspek lingkungan hidup dan sumber daya alam yang unik di setiap daerah di Indonesia. Meskipun tanggung jawab ini sangat penting, masih banyak hambatan dan tantangan yang menghambat lembaga dalam melaksanakan fungsinya secara penuh (Theresia dkk., 2020b). Isu pemindahan ibu kota baru, IKN, yang sedang berlangsung adalah contoh dari hal ini, karena proses tersebut idealnya harus mempertimbangkan aspirasi pemerintah daerah dan hak-hak masyarakat sejak tahap pengumuman. Memastikan bahwa perspektif lokal didengar dan dipertimbangkan menjadi hal yang penting dalam menavigasi kompleksitas yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya, terutama dalam konteks proyek-proyek penting seperti pendirian ibu kota baru.¹⁵

3. Ide Forest City dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Proses politik pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur diperkirakan akan menghadapi tantangan multilateral yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Seiring dengan kemajuan dan kemajuan pembangunan, penting untuk memastikan bahwa fungsi hutan dan keanekaragaman hayati tetap utuh, meskipun mungkin diperlukan pembukaan lahan yang luas. Menyadari dan mengatasi tantangan-tantangan ini, lahirlah konsep Hutan Kota. Berasal dari Stefano Boeri, Hutan Kota membayangkan lanskap kota di mana bangunan-bangunan dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan. Dimasukkannya tanaman dan pepohonan memiliki dua tujuan: tidak hanya berperan penting dalam mengurangi polusi, namun juga berfungsi sebagai penghijauan kota, berkontribusi terhadap pengaturan suhu dan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Konsep inovatif ini sejalan dengan pendekatan pembangunan yang mengutamakan pelestarian ekologi dan pengelolaan lingkungan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Penerapan konsep Kota Hutan telah meraih kesuksesan di berbagai kota di seluruh dunia, dengan Tiongkok sebagai contohnya. Konsep ini berfungsi sebagai

¹⁴ SIHOMBING, Ricky Martin, et al. The impact of Indonesia capital relocation to Kalimantan peatland restoration. *Sociae Polites*, 2020, 21.2: 234-244.

¹⁵ SAPUTRA, Surya Dwi, et al. Analisis strategi pemindahan ibu kota negara Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi pertahanan (studi kasus upaya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Ekonomi Pertahanan*, 2021, 7.2: 192-220.

solusi inovatif untuk menangkal kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkotaan yang pesat. Di Tiongkok, dimana polusi perkotaan dan industrialisasi merupakan tantangan besar, konsep Kota Hutan telah diterapkan secara luas. Pendekatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan hidup, sangat penting dalam mengatasi dampak buruk urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sejak tahun 2004, lebih dari ratusan kota yang tersebar di puluhan provinsi di Tiongkok (200 kota di 18 provinsi) telah secara aktif mengadopsi konsep Hutan Kota. Penerapan yang meluas ini telah menyebabkan peningkatan luas kawasan hutan secara signifikan, hingga mencapai total 13.333 hektar. Inti dari konsep Hutan Kota terletak pada pembangunan kota yang pada dasarnya muncul dari hutan, yang ditandai dengan tutupan pohon yang luas. Pendekatan transformatif ini tidak hanya memperbaiki ekosistem kota tetapi juga memasukkan pembangunan hutan dalam pembangunan perkotaan, sehingga menciptakan keseimbangan antara tempat tinggal manusia dan spesies lainnya. Hasil yang diharapkan serupa dengan lanskap kota yang berfungsi sebagai hutan, yang mencerminkan struktur dan fungsi ekologis hutan alam.¹⁶

Proses kontroversial pemindahan ibu kota ke IKN telah memicu perdebatan, dengan argumen yang mendukung dan menentang inisiatif ini di berbagai dimensi. Secara sosial, muncul kekhawatiran mengenai migrasi penduduk, sedangkan aspek politik melibatkan perdebatan mengenai kebijakan perencanaan. Secara ekonomi, diskusi berpusat pada alokasi modal dan aspirasi untuk mencapai pemerataan ekonomi. Selain itu, keprihatinan terhadap lingkungan juga telah disuarakan, karena Kalimantan Timur menghadapi potensi kerusakan akibat pembangunan yang ekstensif. Meskipun pemerintah, berdasarkan agenda Presiden Joko Widodo, memposisikan transfer dana tersebut sebagai langkah yang terbaik bagi masyarakat dan negara, skeptisisme masih tetap ada, dimana beberapa orang menganggap kebijakan tersebut hanya menguntungkan kelompok kepentingan tertentu. Dalam merumuskan rencana jangka panjang, pemerintah harus berupaya meminimalkan kontroversi dengan membayangkan dan melaksanakan pembangunan secara visioner dan komprehensif, dengan memperhatikan berbagai aspek untuk memastikan manfaat berkelanjutan di masa depan. Potensi konsekuensi dari pengalihan IKN dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa langkah signifikan ini tidak dilakukan dengan sia-sia dan merupakan bagian dari rencana yang matang. Tujuannya adalah untuk membentuk kembali Indonesia secara positif, menciptakan wilayah yang mendorong kesetaraan dan pembangunan tanpa mengorbankan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelaraskan transfer dengan visi berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh bangsa. Untuk melakukan hal ini, pemerintah perlu memprioritaskan langkah-langkah yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan, serta mendorong kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.¹⁷

¹⁶ Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13-29.

¹⁷ SIHOMBING, Ricky Martin, et al. The impact of Indonesia capital relocation to Kalimantan peatland restoration. *Sociae Polites*, 2020, 21.2: 234-244.

KESIMPULAN

Rencana pembangunan IKN merupakan salah satu tujuan kebijakan penting pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk meremajakan dan mempertahankan bangsa. Inisiatif ini melibatkan pemindahan ibu kota ke wilayah baru, sebuah keputusan yang diambil setelah melakukan evaluasi komprehensif terhadap tantangan yang ada di Jakarta. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban penduduk Jakarta yang padat penduduk, mendorong pembangunan dan mendesentralisasikan fungsi-fungsi pemerintah pusat. Pemerintah mengantisipasi pembangunan IKN akan menarik investasi, berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB nasional dan mendorong pemerataan ekonomi.

Namun rencana pembangunan IKN menimbulkan kekhawatiran, terutama mengenai potensi dampaknya terhadap wilayah kaya dengan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Prospek eksplorasi, eksploitasi, dan transformasi kawasan ini menimbulkan risiko lingkungan. Konsekuensi dari perkembangan ini tidak hanya mencakup perubahan geografis, tetapi juga mempengaruhi aspek ekonomi dan politik. Sifat kompleks dari proses pengalihan IKN menggarisbawahi perlunya pendekatan komprehensif yang mengatasi dan memitigasi dampak beragam di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan lingkungan.

Peraturan Pemerintah 71/2014 telah menetapkan peraturan komprehensif untuk perlindungan lahan gambut di Indonesia. Namun meski sudah ada aturan tersebut, pemerintah memilih memindahkan ibu kota baru, IKN, ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah ini memiliki ciri lahan gambut yang luas, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi ancaman terhadap perlindungan gambut akibat aktivitas pembangunan yang ekstensif. Keputusan pemerintah untuk mengalihkan IKN tampaknya bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada di Indonesia terkait lahan gambut dan perlindungan lingkungan. Melihat situasi ini melalui kaca mata perspektif Keynesian, yang menekankan peran pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya untuk optimalisasi perekonomian, maka menjadi penting untuk mengatasi risiko yang terkait dengan transfer IKN. Untuk menyelaraskan perspektif tersebut dan mengatasi potensi risiko lingkungan, pemerintah memperkenalkan konsep Kota Hutan dalam pengembangan IKN. Pendekatan inovatif ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan, dengan menekankan pentingnya perencanaan kota yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak terhadap lahan gambut dan meningkatkan kesejahteraan ekologis jangka panjang. Rencana pengembangan IKN yang terletak di daerah hutan membutuhkan berbagai upaya untuk mencapai dan menjaga keberlanjutan hutan tersebut. Dalam perspektif Keynesian, peran pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Ekstraksi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia yang kaya akan sumber daya alam.

Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi selalu menempatkan tuntutan yang lebih besar pada planet ini, menyebabkan manajemen sumber daya alam mencapai batas maksimumnya.

Dalam perspektif ini, pemindahan ibu kota menjadi suatu proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam proses tersebut, akan timbul beban lingkungan yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar pemindahan IKN tidak sia-sia dalam rencananya dan dapat memberikan wajah baru bagi Indonesia yang mendukung seluruh wilayah dengan melaksanakan kesetaraan dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramadhani, R., & Djuyandi, Y. (2022). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 144-152.
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13-29.
- AMILA, Siti, et al. Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2023, 10-18.
- SAPUTRA, Surya Dwi, et al. Analisis strategi pemindahan ibu kota negara Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi pertahanan (studi kasus upaya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Ekonomi Pertahanan*, 2021, 7.2: 192-220.
- Pembangunan IKN Nusantara hingga Munculnya Petisi - Tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/pengamat-ungkap-alasan-terjadinyapolemik-pembangunan-ikn-nusantara-hinggamunculnya-petisi>
- SIHOMBING, Ricky Martin, et al. The impact of Indonesia capital relocation to Kalimantan peatland restoration. *Sociae Polites*, 2020, 21.2: 234-244.